

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Riau adalah provinsi yang pertumbuhan penduduk sangat pesat di Indonesia dengan jumlah penduduk 6,658 juta jiwa. Salah satunya permasalahan yang timbul di provinsi ini yaitu kemacetan. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan kendaraan bermotor tiap tahun yang otomatis juga ikut meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan alat transportasi yang aman dan nyaman untuk melintasi berbagai wilayah. Alat transportasi yang biasanya dikenal dengan kendaraan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik manusia maupun barang. Sedangkan angkutan pribadi adalah angkutan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi, baik manusia maupun barang contohnya adalah mobil dan sepeda motor.

Isu strategis di bidang transportasi diantaranya adalah kecelakaan lalu lintas dan lingkungan. Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kondisi kendaraan. Untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas serta pengendalian masalah lingkungan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu langkah yang dilakukan adalah melalui Pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 12, pengujian kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus untuk pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak mencemari lingkungan.

Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas layak jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan meliputi:

1. Uji emisi gas buang dan ketebalan asap. Standart maksimum C = 4,5% dan HC = 1200 ppm dan ketebalan asap motor diesel standart maksimal 50%.
2. Pengukuran Penyimpangan kecepatan dengan ketentuan -10 sampai +1
3. Pengukuran penyimpangan sikap roda depan dengan standart -5, +5
4. Pengukuran efisiensi gaya pengereman, dengan standart efisiensi kekuatan minimal 50% dengan catatan penyimpangan roda kanan dan kiri max 30%.
5. Penimbangan berat kendaraan.
6. Pengukuran kemampuan pancar lampu kendaraan. dengan standart minimal 1200 cd untuk lampu jauh dengan penyimpangan 0o 34" dan

peyimpangan kiri 1o 09”.

7. Pemeriksaan bagian bawah kendaraan, yakni meliputi pemeriksaan tingkat kelonggaran/spelingkeausan (suspensi, kemudi dll).
8. Pengukuran tingkat kebisingan suara dengan standart 90-118 dB.

Dalam rangka menjalankan fungsinya dalam bidang transportasi di daerah-daerah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membentuk lembaga yang bertugas atau yang berada langsung di daerah-daerah. Lembaga ini adalah Dinas Perhubungan yang berada di daerah baik di Provinsi maupun yang berada di kota. Dalam hal ini Dinas Perhubungan provinsi Riau mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kendaraan dimana setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain memberikan kontribusi untuk pemasukan kas daerah dampak dalam pengawasan tersebut dapat mencapai ketertiban umum keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas, yang akan mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan lain-lainnya. Dengan melakukan pengawasan maka kendaraan yang tidak laik jalan tidak akan beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu maka dalam hal ini agar dapat terselenggaranya jasa transportasi yang tertib, lancar, aman dan nyaman yang terjangkau oleh masyarakat dalam mencapai jasa transportasi. Sehingga masyarakat merasakan aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya di Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelum pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Cabang Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan provinsi Riau. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterbitkannya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat No.AJ.4021/12DJRD/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Penyelenggaraan Pegujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam rangka Otonomi Daerah, pengujian kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten/ Kota.

Salah satu daerah yang menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan peraturan dirjen perhubungan darat adalah daerah kabupaten Indragiri Hulu. Di kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Indragiri Hulu, unit pengujian kendaraan bermotor dibentuk dalam satu lembaga Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tugas dalam pelaksanaan pengawasan melakukan uji kelayakan terhadap kendaraan bermotor secara berkala. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kendaraan tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan. Dengan tujuan tersebut, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk mampu mewujudkan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dapat cermat dan dipertanggung jawabkan. Standar pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada UPT PKB Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Indragiri Hulu

Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa: *“Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan raya dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.”*. Pembinaan yang dimaksud meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dalam lalu lintas yang akhirnya menciptakan ketertiban lalu lintas. Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pembinaan dengan cara mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawab tersebut. Salah satunya pengawasan terhadap pegujian berkala pada kendaraan bermotor. Namun, Dinas Perhubungan kabupaten Indragiri Hulu masih saja kecolongan dengan adanya kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan tetapi tidak mempunyai izin uji kelayakan jalan atau tidak melakukan pengujian berkala.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum jenis kendaraan bermotor wajib uji adalah kendaraan bermotor yang termasuk kedalam kategori mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta tempelan, kereta gandeng, dan kendaraan khusus. Selain itu keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 1 yang berbunyi “Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat” dan “Dinas Propinsi adalah dinas yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan” yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan



Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 206 ayat 1, menerangkan bahwa: “Pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan harus mendapat pengawasan dari auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Pengawasan ini berupaya untuk menjaga kewanitaan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ekspektasi normatif tersebut dalam prakteknya tidak terlaksana. Pengujian ulangan berkala jarang sekali dilakukan oleh sopir ataupun pemilik mobil dengan asumsi bahwa adanya perilaku tidak patuh pada Peraturan Daerah dan prosedur pengujian yang terlalu sulit. Bahkan banyak sekali sopir atau pemilik mobil barang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah tersebut, hal ini sangat disayangkan karena tidak adanya kesadaran untuk taat pada peraturan.

Selain itu, menyebabkan persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan menjadi tidak terpenuhi. Kendaraan tersebut menjadi tidak laik jalan dan hal ini berdampak pada keselamatan orang lain, terutama keselamatan pengemudi itu sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak laik jalan beroperasi di jalanan kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat dari buku uji kendaraan, dan juga dari tanda uji yang berbentuk plat uji dan tanda samping yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian dari Dinas Perhubungan.

1.1 Daftar Perkara Tilang Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2018

| NO. | NAMA | PASAL | KENDARAAN | DENDA | BIAYA PERKARA | JUMLAH |
|-----|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | Bohairi | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | PICK UP | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 2 | Iskandar | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | TANKI | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 3 | H. Munawar | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | MINIBUS | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 4 | Muchtar | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | PICK UP | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |
| 5 | Irfan Setiawan | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | TRUCK TANKI | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 6 | Fauzi | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | DUMP TRUCK | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 7 | Badrain | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | PICK UP | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 8 | Agus | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | PICK UP | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 9 | H.Sahudin | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) | MINIBUS | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | UU LLAJ | | | | |
|----|-----------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 10 | Wahab | Pasal 288 Jo Psl.106 Ayat (3) UU LLAJ | MINIBUS | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |
| 11 | Juandi Haris | 288 | BUS | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 12 | Asjaya | 285 Ayat (2) UU LLAJ | BUS | Rp 99.000 | Rp. 1000 | |
| 13 | H.Sahrian | 285 Ayat (2) UU LLAJ | BUS | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |
| 14 | Jekwin Sudari | 307 | TRUCK | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 15 | M.Saleh | 288 Ayat (3) UU LLJ | TRUCK | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 16 | Halil | 288 Ayat (3) UU LLJ | TRUCK TANKI | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |
| 17 | Maman Hamzah | | DUMP TRUCK | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |
| 18 | Sawal | 288 Ayat (3) UU LLJ | MINIBUS | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 19 | Jaenur | 288 Ayat (3) UU LLJ | PICK UP | Rp 79.000 | Rp. 1000 | Rp. 80.000 |
| 20 | Asjaya | 288 Ayat (3) UU LLJ | PICK UP | Rp 99.000 | Rp. 1000 | Rp. 100.000 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

Dari tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa basih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan bermotor wajib uji. Pada tahun 2018 terdapat 20 kendaraan bermotor wajib uji yang mendapat tilang terkait tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi standar teknis dan laik jalan di kabupaten Indragiri Hulu.

Sementara itu jumlah penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2018.

| NO | TAHUN ANGGARAN | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | 2015 | 500.000.000 | 648.174.500 | 129,63 |
| 2 | 2016 | 376.992.000 | 687.306.500 | 182,31 |
| 3 | 2017 | 715.206.800 | 634.503.420 | 88,72 |
| 4 | 2018 | 807.922.393 | 632.646.980 | 78,31 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu 2017

Dari tabel 1.2 Diatas dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pada tahun 2017 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar Rp715.206.800 namun pada realisasinya baru mencapai sebesar Rp634.503.420 atau hanya sekitar 88,72% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 retribusi pengujian kendaraan bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar Rp807.922.393,00 namun pada realisasinya hanya tercapai sebesar Rp632.646.980,00 atau sebesar 78,31% dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan kabupaten INHU tidak bisa menutupi target sebesar 11,28% di tahun 2016 dan 21,69% di tahun 2017. Tidak tertutupnya target dalam hal pengujian kendaraan bermotor di Tahun 2017 dan 2018 dikarenakan berkurangnya jumlah kendaraan wajib uji hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya dan banyaknya kendaraan bermotor yang mutasi atau pindah keluar kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi di tahun 2017 dan 2018. Berikut adalah rekapitulasi jumlah kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan wajib uji sesuai jatuh tempo masa ujinya.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Yang Tidak Melaksanakan Wajib Uji Sesuai Jatuh Tempo Masa Ujinya Tahun 2015-2017 Di Kabupaten Indragiri Hulu

| No | Jenis Kendaraan | 2016/unit | | 2017/unit | | 2018/unit | |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Wajib Uji | Realisasi | Wajib Uji | Realisasi | Wajib Uji | Realisasi |
| 1 | Bus Umum | | | | | | |
| | -Ukuran Besar | 262 | 226 | 281 | 214 | 198 | 141 |
| | -Ukuran Sedang | 573 | 86 | 618 | 404 | 524 | 259 |
| | -Ukuran kecil | - | - | - | - | 295 | 276 |
| 2 | Bus Bukan Umum | 77 | 70 | 84 | 81 | 281 | 87 |
| 3 | Mobil Penumpang Umum | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | Pick Up | 2370 | 1891 | 2.838 | 2333 | 3259 | 2574 |
| 5 | Truck sedang | 3018 | 2458 | 3357 | 2776 | 3603 | 2982 |
| 6 | Truck berat | - | - | - | - | 361 | 302 |
| 7 | Kereta | 216 | 101 | 233 | 107 | 194 | 89 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | Tempelan | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8 | Penarik (tractor head) | 224 | 91 | 234 | 103 | 196 | 83 |
| | Jumlah | 6.763 | 4.946 | 7.669 | 6.042 | 8.935 | 6.817 |

Sumber: UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2018

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor yang melakukan uji kelayakan setiap tahunnya mengalami *fluktuatif* dengan jumlah kendaraan yang tidak tetap setiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2016 sejumlah 6.763 unit hanya terealisasi sejumlah 4946 unit, tahun 2017 dari wajib uji sejumlah 7.669 unit hanya terealisasi 6.042 unit dan pada tahun 2018 dari wajib uji berjumlah 8.935 hanya terealisasi sejumlah 6.817 unit. Artinya bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang tidak sesuai standar beroperasi di jalan raya kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengujian.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat juga fenomena-fenomena yang terjadi dan dapat dilihat bahwa kondisi kondisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu sampai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang masih dalam keadaan yang tidak bagus sampai saat ini, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Banyak Kendaraan bermotor yang tidak memiliki lampu belakang lampu *sign* yang sudah rusak dan rem yang tidak sesuai dengan peraturan Kendaraan, hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.
2. Kondisi fisik, kelengkapan kenyamanan dan keselamatan kendaraan sudah tidak bagus lagi.
3. Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memiliki sabuk yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Sabuk pengaman merupakan syarat yang harus dipenuhi suatu kendaraan yang bertujuan untuk pengaman pengemudi.
4. Kondisi kendaraan bermotor yang sudah buruk bahkan sudah berusia tua yang mengeluarkan emisi gas buang yang hitam pekat yang akan mengganggu pengguna lalu lintas dan jalan dan pintu kendaraan bermotor wajib uji yang dibiarkan terbuka begitu saja dimana sangat membahayakan penumpang.
5. Masih ada kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melakukan uji berkala, uji laik jalan di Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengawasan Standar Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu”** .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan terhadap standar uji kelayakan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Kendala- kendala apa saja dalam pengawasan standar uji kelayakan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengawasan standar uji kelayakan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam pengawasan standar uji kelayakan kendaraan bermotor di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis.
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu yakni ilmu administrasi negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut, tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Secara praktis

Sebagai masukan (rekomendasi) bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan standar uji kelayakan kendaraan bermotor di UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang mendasari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran dan teknik pengujian penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN & SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Di dalam bab ini disampaikan beberapa kesimpulan, serta saran yang relevan.

